

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional dapat dipahami sebagai hubungan antar bangsa yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi dan diplomasi, dimana politik dan hukum merupakan dua aspek utama dari ilmu hubungan internasional (Sitepu, 2011). Dengan perkembangan zaman dan teknologi, ilmu hubungan internasional melibatkan lebih banyak masalah, salah satunya adalah keamanan. Berakhirnya Perang Dingin menandai era baru dalam kesadaran keamanan. Setelah Perang Dingin, keamanan tidak lagi hanya bergantung pada konflik ideologis antara Timur dan Barat, tetapi keamanan sekarang dianggap mencakup ekonomi, pembangunan, kebijakan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, konflik etnis, dan aspek lainnya. Keamanan tidak lagi secara ketat didefinisikan sebagai konflik atau kerja sama antar negara, tetapi juga berfokus pada keselamatan orang (Dalby, 1992). Salah satu ancaman terhadap keselamatan publik di dalam dan luar negeri saat ini adalah bencana alam. Sementara bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik telah berkurang, bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam telah meningkat dan dampaknya sangat besar, terutama setelah tahun 1990-an.

Dengan lahirnya ilmu hubungan internasional pada masa-masa awal Perang Dunia II, bencana menjadi isu utama. Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962 menandai dimulainya manajemen darurat dan pengembangan pertahanan sipil yang bertujuan melindungi pemerintah dan masyarakat dari efek perang nuklir. Ketika Uni Soviet menembakkan rudal, pembuat kebijakan pertahanan melakukan pekerjaan identifikasi untuk mengevakuasi pejabat publik dan warga AS. Selain melembagakan penanggulangan bencana, Amerika Serikat juga mendanai penelitian bencana untuk mengetahui perilaku manusia dalam menanggapi bencana (Sinulingga A. , 2016). Setiap negara terus menjalin kerja sama dengan berbagai aktor, seperti organisasi internasional, organisasi internasional, dan kerja sama bilateral dan regional dengan negara-negara untuk melakukan upaya inovatif untuk mengupayakan penanggulangan bencana yang memadai bagi negara masing-masing. Belum ada peraturan internasional yang komprehensif dan mengikat untuk

penanggulangan bencana, namun *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) periode 2015-2030 telah diakui oleh semua negara sebagai pedoman penanggulangan bencana.

SFDRR periode 2015-2030 merupakan sebuah bentuk perjanjian antar negara yang menandatangani perjanjian tersebut untuk melakukan manajemen bencana di negaranya masing-masing. Kerangka ini sendiri diadopsi dari *Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction* diselenggarakan pada 14-18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Kerangka kerja itu sendiri menawarkan peluang baru bagi negara:

1. Untuk mengadopsi kerangka manajemen bencana yang singkat, padat, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan serta berorientasi terhadap aksi dalam resiko pengurangan bencana
2. Untuk menyelesaikan assesment dan hasil dari implementasi *HFA for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster*
3. Untuk mempertimbangkan pengalaman yang didapatkan melalui strategi nasional atau regional/institusi dan rencana terkait resiko pengurangan bencana dan rekomendasinya, sejalan dengan perjanjian regional dalam implementasi dari HFA
4. Untuk mengidentifikasi modalitas berdasarkan kerjasama dan komitmen untuk implementasi dari kerangka pasca 2015 dalam resiko pengurangan bencana
5. Untuk menjelaskan modalitas dengan peninjauan berbentuk periodik untuk implementasi dari kerangka pasca 2015 dalam resiko pengurangan bencana (UNDRR, 2015).

Pada pertemuan tersebut, negara juga menegaskan kembali komitmennya untuk mengurangi risiko bencana untuk membangun ketahanan. Fokus mendesak dari kerangka tersebut adalah mengupayakan untuk membentuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator-indikator yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan

bencana melalui kebijakan, rencana, rencana kerja dan anggaran di semua tingkatan dan dalam kerangka yang sesuai (UNDRR, 2015)

Ada beberapa indikator prioritas suatu negara untuk memenuhi komitmennya di bawah *SFDRR*, yaitu:

1. Prioritas 1: Memahami risiko bencana
2. Prioritas 2 : Memperkuat manajemen risiko bencana
3. Prioritas 3: Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan
4. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk responss yang efektif dan "*Build Back Better*" dalam pemulihan, pemulihan, dan rekonstruksi (UNDRR, 2015)

Untuk mengurangi risiko bencana setiap negara *SFDRR* perlu menerapkan empat prioritas dengan cara yang berbeda untuk memperkuat manajemen bencana negara tersebut. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam yang relatif tinggi, menurut laporan bencana Asia-Pasifik 2015. *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN), dengan populasi 600 juta, dengan 10 negara anggota, kerugian tahunan rata-rata sekitar \$ 4,4 miliar karena bencana alam. Berbagai tantangan bencana yang dihadapi ASEAN berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam. Bencana-bencana tersebut memiliki tingkat dan tingkat kerentanan yang berbeda, dan kapasitas tanggap bencana juga berbeda. Beberapa bencana terburuk di Asia Tenggara dalam dekade terakhir telah menjadi sedang, hampir bersamaan dan parah dalam beberapa tahun terakhir, seperti tsunami Samudra Hindia 2004 dan topan Nargis 2008 (AHA Centre, 2014).

SFDRR secara khusus diprakarsai untuk memajukan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana secara global untuk lebih memahami kompleksitas risiko bencana di zaman kita sekarang. Implementasi *SFDRR* sejak tahun 2015 telah menunjukkan potensi yang besar meliputi seluruh area dalam mengatasi isu perubahan iklim dan resiko bencana. Dengan adanya *SFDRR* yang ditandatangani oleh berbagai negara secara sukarela menjadikan banyak negara yang terpengaruh untuk meningkatkan aktivitas riset dan kontribusi terhadap pengetahuan atau inovasi terkait risiko bencana. Hal ini dibuktikan oleh negara United Kingdom (UK) yang berada di peringkat pertama dalam kontribusinya terhadap riset pengurangan

risiko bencana. Banyak penelitian berbasis studi kasus juga berjalan di Kamerun, Kanada, dan Kolombia yang menambah banyaknya penelitian terhadap pengurangan risiko bencana dan bermanfaat untuk situasi darurat yang mungkin terjadi kedepannya (Busayo, Kalumba, & et.al., 2020).

Dalam menyusun SFDRR tentunya melibatkan banyak aktor baik di lingkup nasional, regional, maupun dunia. Aktor-aktor yang mendukung implementasi dari SFDRR antara lain adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi regional dan internasional, institusi finansial di lingkup regional dan agensi pendonor dana yang berhubungan dengan manajemen pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan koordinasi dari strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi di bawah PBB meliputi agensi yang khusus di bidang pendanaan dan program melalui *United Nations Plan of Action on Disaster Risk Reduction for Resilience*, *United Nations Development Assistance Frameworks* dan program dari berbagai negara bertugas untuk mempromosikan penggunaan sumber daya dan membantu negara berkembang untuk mengimplementasikan *SFDRR*. Berikutnya *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR) juga turut serta dalam mendukung implementasi, *follow-up*, dan menilai progress dari *SFDRR* di berbagai negara dengan penilaian berbasis indikator prioritas yang terdapat di dalamnya. Lembaga finansial internasional seperti Bank Dunia dan Bank Perkembangan Regional juga terlibat dalam menyediakan dukungan finansial dan pinjaman dalam implementasi pengurangan risiko bencana kepada negara berkembang. Selain itu, organisasi internasional dan badan perjanjian termasuk *Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk mendukung negara berkembang dan melakukan koordinasi terhadap lembaga terkait. Hal yang paling terpenting adalah peran dari pemerintah lokal dalam membantu melanjutkan kerjasama dan belajar bersama dalam melakukan pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015).

Di antara negara di Asia Tenggara, Filipina merupakan negara yang menarik untuk dibahas karena Filipina merupakan negara yang rawan bencana. Filipina adalah negara kepulauan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Filipina, terdiri dari 7.107 pulau besar dan kecil. Negara ini telah dikaitkan dengan Kerajaan Spanyol selama lebih dari 300 tahun, selamat dari revolusi kekuatan rakyat yang

bertujuan untuk menggulingkan kediktatoran, dan merupakan salah satu pendiri PBB pada tahun 1945, ASEAN pada tahun 1967 dan *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995 dan East Asia Summit (EAS) tahun 2005 (UNDRR, 2015).

Karena negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, Filipina rawan terhadap bencana alam seperti angin topan, letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor dan kekeringan. Penyebab terjadinya bencana alam ini adalah faktor iklim dan lingkungan yang tidak stabil. Selain terletak di Cincin Api Pasifik, Filipina juga sangat aktif dalam aktivitas seismik. Selain di wilayah Palawan, juga terdapat risiko tinggi terkait kenaikan muka air laut di sepanjang pantai Filipina, yang meningkatkan risiko tersebut. Filipina rentan terhadap bencana alam, bencana biasanya menyebabkan bencana lain, sehingga bencana ini saling terkait. Selain menimbulkan kerawanan masyarakat dan dampak ekonomi, bencana yang saling terkait inilah yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan perumahan. Beberapa bencana di Filipina antara lain letusan gunung Mayon pada Januari 2018, Siklon Tropis Tembin pada Desember 2017, dan gempa Juli 2017 (CFE-DM, 2018).

Tabel 1. 1 Peringkat Negara yang Paling Terdampak Cuaca Ekstrem, Filipina dalam periode tahun 2000-2019 berada dalam peringkat 4.



CRI 2000-2019 (1999-2018)	Country	CRI score	Fatalities	Fatalities per 100 000 inhabitants	Losses in million US\$ PPP	Losses per unit GDP in %	Number of events (2000-2019)
1 (1)	Puerto Rico	7.17	149.85	4.12	4 149.98	3.66	24
2 (2)	Myanmar	10.00	7 056.45	14.35	1 512.11	0.80	57
3 (3)	Haiti	13.67	274.05	2.78	392.54	2.30	80
4 (4)	Philippines	18.17	859.35	0.93	3 179.12	0.54	317
5 (14)	Mozambique	25.83	125.40	0.52	303.03	1.33	57
6 (20)	The Bahamas	27.67	5.35	1.56	426.88	3.81	13
7 (7)	Bangladesh	28.33	572.50	0.38	1 860.04	0.41	185
8 (5)	Pakistan	29.00	502.45	0.30	3 771.91	0.52	173
9 (8)	Thailand	29.83	137.75	0.21	7 719.15	0.82	146
10 (9)	Nepal	31.33	217.15	0.82	233.06	0.39	191

The 10 countries most affected from 2000 to 2019 (annual averages)

Sumber: GermanWatch, 2019

Filipina rentan terhadap berbagai bahaya alam dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin topan. Rata-rata, 20 gempa bumi diamati per hari (kebanyakan terlalu lemah untuk dirasakan). Lokasinya yang berada di sepanjang *hurricane belt/superhighway* di Pasifik juga membuatnya

rawan terhadap kejadian cuaca ekstrem. Selain itu, rata-rata 20 topan terjadi di Filipina setiap tahun. Garis pantai yang luas juga menyebabkan Filipina rentan terhadap tsunami, membuat negara ini rawan terhadap kenaikan permukaan laut dan gelombang badai. Hal ini menyebabkan fenomena sekunder banjir, tanah longsor, hujan monsun (sangat deras), dan kekeringan.

Saat ini, bencana alam mempengaruhi orang-orang di Asia dan Pasifik empat kali lebih sering daripada di Afrika dan 25 kali lebih sering daripada di Eropa atau Amerika Utara. Titik akses di Asia, termasuk diantaranya negara Bangladesh, Filipina, dan Vietnam. Dengan perkiraan historis memiliki risiko tertinggi kerugian manusia dan kerusakan ekonomi. Bencana alam dan keadaan darurat yang terkait seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, termasuk hilangnya banyak nyawa. Setiap ancaman baru mengungkapkan tantangan dalam menangani risiko dan efek kesehatannya. Krisis bencana menyebabkan penyakit secara langsung atau dengan mengganggu sistem, fasilitas dan layanan kesehatan. Akibatnya, beberapa orang, terutama penduduk yang kurang beruntung, tidak memiliki akses ke perawatan medis dalam situasi darurat. Infrastruktur dasar seperti pasokan air dan perumahan yang aman, yang penting untuk kesehatan, juga berpengaruh (Doroteo, 2015)

Berkaitan dengan hal tersebut, Filipina merupakan salah satu negara yang menyambut baik diadopsinya SFDRR 2015-2030 dengan ikut meratifikasi SFDRR pada tanggal 19 Maret 2015 yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Filipina atau instansi terkait untuk fokus pada penanggulangan bencana di Filipina, seperti sebagai *National Disaster Risk Reduction and Management Council* (NDRRMC). NDRRMC adalah lembaga utama di Filipina, yang berfokus pada koordinasi kesiapsiagaan, responss, pencegahan dan mitigasi, serta pemulihan dan pemulihan. Selain NDRRMC, *Department of Social Welfare and Development* (DSWD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggap bencana melalui Kantor Penanggulangan Bencana dan Bantuan. *Office of Civil Defense* (OCD) terlibat dalam pelaksanaan Sekretariat Bencana Nasional dari NDRRMC, yang bertanggung jawab atas Pertahanan Sipil Nasional dan Manajemen proyek manajemen pencegahan risiko bencana (CFE-DM, 2018).

Selain aktor pemerintah, Filipina juga memiliki *Non-Governmental Organization* (NGOs) yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah *International Federation of the Red Cross and Red Crescent* (IFRC), yang merupakan organisasi kemanusiaan yang membantu dan mempromosikan tanggap bencana melalui organisasi kegiatan kemanusiaan. Sementara, organisasi nasionalnya adalah *Philippine Red Cross* (PRC), sebuah organisasi non-pemerintah sukarela dan independen yang misinya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, termasuk manajemen bencana, dan merupakan anggota penuh dari organisasi risiko bencana di tingkat nasional dan merupakan bagian dari Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan manajemen di tingkat lokal, nasional dan lokal. Pada saat yang sama, dalam menanggapi bencana alam besar, Filipina dapat memperoleh bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Bantuan tersebut diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam situasi kemanusiaan seperti bencana alam (CFE-DM, 2018).

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil studi literatur dari artikel-artikel yang membahas terkait upaya pemerintah Filipina dalam melakukan respons bencana beserta tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam melakukan hal tersebut yang sesuai dengan indikator yang terdapat pada SFDRR dalam periode waktu 2016-2020. Hingga saat ini, pemerintah Filipina dibantu oleh aktor yang fokus terhadap situasi bencana telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan respons bencana di Filipina.

Literatur pertama adalah artikel yang berjudul ***“Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional”*** yang ditulis oleh Anita Afriani Sinulingga. Di dalam artikel ini dibahas bahwa bencana dapat dilihat menggunakan perspektif isu keamanan non-tradisional. Bencana adalah isu yang akan menimbulkan resiko bagi masyarakat terdampak. Resiko sendiri adalah gabungan dari bahaya dan kerentanan terhadap kemampuan masyarakat terdampak. Bencana akhir-akhir ini melibatkan banyak aktor bukan hanya aktor negara seperti pemerintah negara setempat, tetapi juga organisasi internasional, kelompok masyarakat, perusahaan multinasional, dan media massa.

Isu bencana dan hubungan internasional secara intrinsik terkait dengan keberadaan penelitian dan manajemen bencana, yang telah mengarah pada perkembangan hubungan global. Krisis misil Kuba yang terjadi di tahun 1962 menjadi awal lahirnya manajemen bencana dengan perkembangan pertahanan sipil yang berguna untuk melindungi pemerintah dan masyarakat dari perang nuklir. Selain itu, ilmu Hubungan Internasional dan bencana ada di dalam bahasan organisasi internasional dan menjadi fokus dari PBB dan organisasi non-pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya *United Nations Disaster Relief Organization* di tahun 1971 yang merupakan agensi PBB yang bertujuan mengoordinasikan bantuan internasional kepada negara-negara yang terkena bencana alam; dan Organisasi Palang Merah Dunia, yang sebelumnya hanya fokus membantu yang terluka dalam situasi perang, berubah menjadi operasi untuk membantu korban bencana.

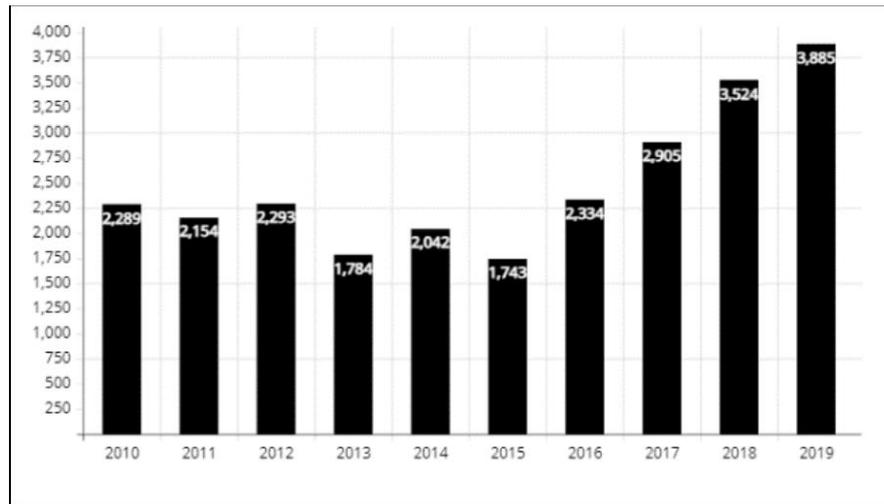
Literatur berikutnya adalah artikel berjudul “*Acting on Disaster Diplomacy*” yang ditulis oleh Ilan Kelman. Dalam artikel ini ditanyakan apakah negara yang sebelumnya bermusuhan dapat melakukan kerjasama internasional. Apakah aktivitas yang berkaitan dengan mitigasi, pencegahan, atau pasca bencana seperti respons dan pemulihan bencana dapat berdampak terhadap hubungan antar negara. Contoh yang diteliti di dalam artikel ini adalah gempa bumi di Yunani dan Turki di tahun 1999 dan angin topan yang terjadi di Kuba dan Amerika Serikat. Kesimpulan yang di dapat di dalam artikel ini adalah bencana dapat berdampak signifikan terhadap proses diplomatik tetapi bencana sendiri jarang dapat menghasilkan diplomasi baru. Diplomasi bencana sebelumnya berfokus pada tiga area utama. Pertama adalah analisis studi kasus yang menjelaskan dimana dan bagaimana diplomasi bencana ditelaah atau dilaksanakan. Area kedua adalah penjelasan bagaimana diplomasi bencana dilakukan dalam bentuk lainnya seperti diplomasi lingkungan. Masalah yang terjadi adalah apakah isu manajemen lingkungan dan traktat yang ada dapat mengeluarkan hasil diplomasi yang positif. Area ketiga meliputi karakter dan kategori dari diplomasi bencana. Karakter utamanya adalah perbandingan antara diplomasi bencana pasif dan aktif.

Literatur berikutnya adalah artikel berjudul “*Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional*”

oleh Sugeng Yulianto, Rio Khoirudin Apriyadi, Aprilyanto, Tri Winugroho, Iko Sarikanti Ponangsera, dan Wilopo. Kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan bencana (alam, tidak alami dan sosial). Gempa bumi sebagai bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik yang disertai tsunami maupun tidak, menunjukkan bahwa bencana alam adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Dalam sejarah bencana, bencana dapat terulang di tempat yang sama, meskipun dengan tingkat kerugian, intensitas, frekuensi dan distribusi yang berbeda, seperti letusan Gunung Merapi di DI Yogyakarta yang meletus antara tahun 1600 dan 2010 sebanyak lebih dari 80 kali. Contoh lain adalah bencana banjir di DKI Jakarta yang biasanya terjadi setiap tahunnya. Hal ini memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir tentang pentingnya penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana atau lebih dikenal dengan *Disaster Risk Reduction* (DRR).

Tujuan utama DRR adalah untuk mengurangi kerugian akibat dampak bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengurangi keterpaparan dan ketahanan masyarakat melalui kesiapsiagaan, respons bencana dan pemulihan. Penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi setiap warga negara sebagai bentuk *human security* bagi setiap individu dalam suatu negara. Keamanan manusia sebagai warga negara merupakan bagian dari keamanan nasional, yang dijamin oleh negara melalui pemenuhan kewajiban untuk melindungi warga negara dari risiko bencana yang akan datang, baik mental maupun fisik. Hal ini menggambarkan perlunya pengurangan risiko bencana, dengan mempertimbangkan faktor historis dari peristiwa masa lalu sebagai antisipasi dalam penanggulangan bencana di Indonesia mengingat pentingnya sejarah dan bantuan bencana di Indonesia. Selama satu dasawarsa terakhir, data DesInventar Indonesia menunjukkan bahwa ada tren peningkatan bencana di Indonesia.

Grafik 1. 1 Distribusi Bencana Alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 – 2019



Sumber Data: DesInventar Indonesia, 2019

Literatur selanjutnya berjudul *“Philippines: Disaster Risk Profile and Disaster Risk Reduction (DRR) Framework: Natural Calamities”* yang ditulis oleh Harold James E. Doroteo. Di dalam literatur ini menjelaskan bahwa Filipina pada dasarnya terkena gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin topan dan bencana alam lainnya. Rata-rata, 20 gempa bumi diamati setiap hari (kebanyakan terlalu lemah untuk dirasakan). Lokasinya yang berada di Pacific Hurricane Belt/Highway juga membuatnya rentan terhadap kejadian cuaca ekstrim. Garis pantai yang luas juga rentan terhadap tsunami, membuat negara ini rentan terhadap naiknya permukaan laut dan gelombang badai. Hal ini pada gilirannya menyebabkan fenomena sekunder, banjir, tanah longsor, angin muson (sangat kuat), dan kekeringan. Karena terletak di Cincin Api Pasifik, negara ini sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sejak lempeng tektonik besar telah terjadi di daerah ini, data statistik tentang gempa bumi besar berkekuatan lebih kecil sangat teratur. Telah terjadi 5 gempa bumi dahsyat dan korban jiwa dalam dua dekade terakhir (1990-2010), 15 di antaranya tewas dan 119 luka-luka. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 207 juta peso Filipina. Gempa bumi Luzon 1990, tsunami Teluk Morro dan runtuhnya Menara Ruby adalah yang terburuk.

Dengan rentannya bencana di Filipina, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan. Pertama, adalah dampak untuk kesehatan masyarakat. Setiap ancaman baru mengungkapkan tantangan dalam menghadapi risiko dan dampak

kesehatannya. Krisis bencana menyebabkan penyakit baik secara langsung maupun melalui penghancuran sistem, fasilitas dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, beberapa orang, terutama kelompok rentan, tidak dapat mengakses layanan medis dalam situasi darurat. Jika kesehatan terganggu dan kebutuhan kesehatan tidak sepenuhnya terpenuhi, dampak kesehatan lainnya termasuk kematian dan perpindahan penduduk. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan meneliti kondisi dan kebutuhan kesehatan dasar penduduk yang terkena bencana alam dan menemukan bahwa insiden dan prevalensi penyakit menular tinggi. Kemudian, dampak terhadap lingkungan. Polusi merupakan dampak utama dari bencana alam di Filipina. Peningkatan morbiditas memainkan peran penting dalam degradasi lingkungan.

Literatur selanjutnya adalah artikel berjudul *“A Case Study for Early Warning and Disaster Management in Thailand”* oleh S.H.M. Fakhrudning dan Y. Chivakidakarn. Badai Sandy berskala besar, yang melanda pantai timur Amerika Serikat pada akhir Oktober 2012, menewaskan banyak orang, membanjiri wilayah metropolitan besar, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur lokal senilai puluhan miliar dolar adalah contoh nyata bahwa Sistem Peringatan Dini penting untuk memperingatkan manusia agar meminimalisir jumlah korban. Dengan peralatan teknis terbaru, sistem ini dapat memprediksi hampir seminggu sebelumnya di mana, bagaimana, dan seberapa keras Sandy akan mendarat di AS. Dalam kesiapsiagaan dan tanggapan, pejabat pemerintah di tingkat lokal hingga negara bagian mengeluarkan berbagai nasihat di sepanjang pantai AS. Dengan berbagai cara, mereka memerintahkan evakuasi daerah dataran rendah, mendirikan tempat perlindungan bagi orang-orang terlantar, dan memobilisasi sumber daya secara tepat waktu. nyawa manusia dan kerusakan harta benda lainnya Jutaan dolar.

Liputan media awal tentang bencana tersebut juga menunjukkan bahwa respons pemerintah federal, yang tampaknya telah mengambil pelajaran dari bencana yang merupakan respons federal terhadap Badai Katrina, juga cukup berhasil dalam hal ini. Sementara orang hanya dapat berspekulasi tentang dampak penuh sosio-ekonomi Sandy saat ini, penilaian kapasitas politik dan kelembagaan dari berbagai sektor dan ukuran dalam kaitannya dengan peringatan dini dan manajemen bencana pasti akan berlanjut selama beberapa dekade mendatang.

Banyak dari penilaian ini akan memeriksa aspek-aspek spesifik dari peristiwa tersebut, mulai dari prakiraan hingga peringatan dini, manajemen, dan pemulihan jangka panjang. Dengan cara ini, evolusi sebagian besar evaluasi ini dibingkai dalam: standar UNISDR formal yang mendefinisikan PRB sebagai “Tindakan untuk mengurangi risiko bencana dan efek negatif dari bahaya alam melalui upaya untuk mengatasi penyebab, menganalisis dan mengelola bencana, termasuk menghindari bahaya, mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bahaya dan lebih siap menghadapi kejadian buruk”. Oleh karena itu, setiap evaluasi Sandy yang akan datang akan membantu dengan caranya sendiri. Misalnya, memberikan pelajaran institusional untuk dipelajari dalam merencanakan dan menanggapi peristiwa di masa depan, menunjukkan kesalahan dalam komunikasi dan manajemen pengetahuan, dan lainnya memberikan data yang berguna. Teknologi dan keterampilan peramalan akan meningkat dalam melacak peristiwa berbahaya di masa depan. Kisah dari Amerika inilah yang juga menjadi pelajaran bagi Thailand untuk membangun sistem peringatan dini dan melakukan manajemen bencana di negaranya.

Literatur selanjutnya adalah artikel dengan judul ***“Building Back a Better Nation: Rehabilitation and Recovery in the Philippines”*** yang ditulis oleh Ebinezer R. Florano, Joe-Mar S. Perez, dan Abel Táiti Konno Pinheiro. Salah satu prioritas utama di dalam *Philippine Disaster Risk Reduction and Management System (PDRRMS)* adalah *Disaster Rehabilitation and Recovery (DRRE)*. DRRE meliputi pembangunan kembali dari infrastruktur dan pengaturan berdasarkan bencana dan restorasi dari mata pencaharian menjadi normal kembali kepada komunitas yang terdampak. Untuk memahami DRRE, artikel ini mengeksplorasi terkait operasional yang terjadi ketika bencana di Filipina. Pemerintah Filipina dahulu berfokus terhadap meningkatkan dan memperkuat operasi respons bencana. Tetapi, karena adanya celah antara pra-bencana dan pasca bencana, Filipina mengalihkan paradigma dari respons bencana yang reaktif dan kordinasi menjadi *Disaster Risk Reduction and Management (DRRM)* yang proaktif. Untuk melakukan operasional DRRM, terdapat 4 hal yang menjadi fokus utama yakni: (i) *Disaster Prevention and Mitigation*, (ii) *Disaster Preparedness*, (iii) *Disaster Response*; dan (iv) *Disaster Rehabilitation and Recovery*.

Untuk melaksanakan DRRE, rencana NDRRMC diformulasikan. Melalui rencana tersebut, DRRE meliputi fokus yang berhubungan dengan pekerjaan dan mata pencaharian, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta perumahan dan pemukiman kembali. Dalam rangka mencapai hal tersebut, rencana NDRRMC menekankan pada 4 hal yakni (i) untuk mengembalikan arti mata pencaharian bagi orang-orang dan kelanjutan aktivitas ekonomi dan bisnis, (ii) untuk mengembalikan penampungan dan bangunan/instalasi lainnya, (iii) untuk merekonstruksi infrastruktur dan utilitas publik lainnya; dan (iv) untuk mendampingi rehabilitasi fisik dan psikologis dari korban yang terdampak bencana. Walaupun DRRE menjadi hal penting di PDRRMS, rencana NDRRM menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga kesinambungan dengan indikator lainnya di rencana NDRRM sangat penting.

Prinsip *“Build Back Better”* menjadi penting untuk memastikan tidak hanya terjadi restorasi wilayah terdampak menjadi normal kembali tetapi menjadi lebih baik dari sebelumnya agar tidak mengalami kemalangan yang sama di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan yakni: (i) melibatkan wanita untuk perencanaan bagaimana cara membangun lebih baik, (ii) memperkuat mata pencaharian dan kesehatan komunitas, (iii) memastikan proyek sosial-ekonomi tidak menambahkan beban yang berbagai macam terhadap wanita, (iv) meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan terhadap komunitas, dan (v) meningkatkan opsi mata pencaharian dan akses terhadap sumber daya tersebut.

Literatur berikutnya adalah artikel berjudul *“Impacts of Disaster Risk Management in Malaysia: The Case of Floods”* yang ditulis oleh Ngai Weng Chan. Malaysia terletak di wilayah yang stabil secara geologis yang tidak memiliki gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan angin kencang seperti siklon tropis yang secara teratur menghantam beberapa tetangganya. Secara geografis tepat di belakang "Cincin Api Pasifik". Itu juga terlalu jauh di selatan jalur utama topan, meskipun puncak Siklon Tropis kadang-kadang menghantamnya. Namun, bukan berarti Malaysia benar-benar "bebas" dari bencana alam dan malapetaka, karena sering dilanda banjir, kekeringan, tanah longsor, kabut asap, tsunami, dan bencana buatan manusia. Setiap tahun, bencana seperti banjir menyebabkan banyak kematian, wabah penyakit, kerusakan harta benda dan tanaman, dan kerugian tak berwujud

lainnya. Fenomena kabut asap tahun 1997/1998 juga menimbulkan masalah yang cukup besar karena hilangnya pendapatan dari pariwisata, konsekuensi bagi kesehatan dan rawat inap, serta pengurangan kerugian. semenanjung Malaysia.

Literatur selanjutnya adalah artikel berjudul ***“Pelajaran pada Manajemen Bencana di Jepang untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”*** yang ditulis oleh Aida Rahma Savitri, Admiral Musa Julius, Andi Windra Sandi, Fadhiil Ali Hakim, Nrangwesthi Widyaningrum, Sri Kartika Sakti, dan I Dewa Ketut Kerta Widana. Menurut artikel ini Jepang adalah salah satu negara yang rentan akan bencana dengan berbagai pengalaman bencananya kebanyakan adalah gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh Jepang yang berada di kawasan cincin api seperti Indonesia dan Filipina sehingga menyebabkan kondisi yang rawan akan bencana. Jepang mengelola risiko bencana ini dengan melihat kembali sejarah dari masyarakat yang terdampak bencana besar seperti Gempa Kobe yang terjadi di 17 Januari 1995 dengan berkekuatan 6,9 skala richter dan menyebabkan korban jiwa sekitar 6,434 orang. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Jepang untuk selalu waspada dengan risiko bencana di depan mereka yang mungkin saja menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerugian.

Regulasi yang diterapkan di Jepang salah satunya adalah seluruh bangunan di Jepang harus mengikuti aturan pemerintah agar memenuhi dua syarat yakni bangunan tidak akan runtuh karena gempa bumi dalam jangka waktu 100 tahun dan jaminan bangunan yang tidak akan rusak selama 10 tahun kedepan. Sistem manajemen risiko bencana mereka mirip dengan penekatan Konsultan Manajemen Risiko Bencana di Filipina dengan tugas untuk mengatur anggaran, program yang terstruktur, pengelolaan strategi di berbagai tingkat daerah, serta konsistensi program pemerintahnya dalam pengurangan risiko bencana. Jepang juga mengumpulkan berbagai bencana yang mungkin terjadi dan menyusun rencana terkait apa saja yang harus mereka lakukan. Selain itu, anak-anak di Jepang diharuskan untuk mengenal alarm peringatan dini akan gempa bumi sehingga ketika alarm berbunyi mereka harus mencari tempat perlindungan untuk melindungi mereka dari reruntuhan bangunan dan jika diluar mereka harus segera melarikan diri ke tempat terbuka. Mitigasi juga dilakukan dengan berbagai pembangunan dan pendidikan akan bencana terhadap masyarakatnya. Investasi

Jepang untuk pengurangan risiko bencana juga menjadi hal utama disebabkan oleh Gempa Kobe yang menimbulkan kekhawatiran mendalam oleh Jepang akan risiko dari bencana.

Literatur berikutnya berjudul *“Five Years Beyond Sendai – Can We Get Beyond Frameworks?”* oleh Ben Wisner. Artikel ini mengajukan berbagai pertanyaan yang muncul selama 5 tahun adopsi *SFDRR* dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah terkait pemahaman tentang bencana, dan tindakan pemerintah dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam *Hyogo* dan *SFDRR*. Terkait pemahaman tentang bencana, peneliti menjelaskan bahwa bencana tidaklah “alami” dan menyimpulkan bencana alam adalah konsep yang salah dan menyesatkan. Proses fisik yang membahayakan atau kegiatan alam menjadikan manusia rentan dan terekspos oleh bencana. Kerentanan disebut sebagai sesuatu yang situasional dan bukanlah karakteristik yang permanen. Sekelompok orang yang rentan dibuat rentan karena proses sosial dan banyak kemungkinan sekelompok orang tersebut menjadi semakin rentan atau semakin tangguh dengan keputusan kebijakan. Pasca 2015, terdapat tujuh inisiatif yang terjadi akibat dinamika dari geopolitik dan politik intra dan antar lembaga dengan janji bahwa akan adanya perdamaian yang tercipta pasca 2030. Tujuh inisiatif tersebut meliputi (i) SDGs, (ii) *Paris Agreement* (meliputi *UN Framework Convention on Climate Change*), (iii) *Addis Ababa Action Agenda (Financing for Development)*, (iv) *World Humanitarian Summit*, (v) *New Urban Agenda*, (vi) berbagai inisiatif perdamaian dan keamanan regional, serta (vii) *SFDRR*.

Di tahun 2010, pemerintah Haiti gagal untuk mendampingi mereka yang terdampak bencana gempa bumi di tahun 2010 akibat pemerintahan yang lemah dan kecenderungan untuk melakukan tindak korupsi dan fakta ini dibawa menjadi pertimbangan dalam persiapan konferensi dunia di Sendai. Tantangan utama dari manajemen bencana adalah isu stabilitas dan respons dari pihak yang terlibat di negara terdampak. Setelah kerjasama HFA ditandatangani, muncul pertanyaan apakah implementasi dari HFA akan mengatasi masalah yang selama ini disuarakan oleh masyarakat sipil dan peneliti mengenai dampak dari investasi langsung dari luar negeri terkait penciptaan risiko. Risiko yang dimaksud di sini adalah peningkatan hasil investasi yang tidak mempedulikan risiko yang dilakukan baik

oleh entitas public maupun swasta, terutama terhadap investasi megaprojek seperti pembangkit listrik tenaga air, pertambangan, ekstraksi energi, pelabuhan baru, dan satelit kota yang menyebabkan perpindahan penduduk skala besar. Sementara, selama 5 tahun pertama berjalannya SFDRR, pemerintah mendapat tekanan untuk mengizinkan investasi skala besar di *hydropower*, pertambangan, agribisnis skala besar, perkotaan dengan teknologi terbaru, dan pembangunan perumahan mewah yang semakin meningkat. Ini menjadi tantangan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan beberapa pemerintahan menolak proyek besar ini berdasarkan kemungkinan orang kehilangan tempat tinggal, dan kerusakan mata pencaharian dan lingkungan. Urbanisasi juga berdampak besar terhadap tata kelola manajemen bencana karena pertumbuhan stratifikasi di antara kelas menengah ke atas dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan akomodasi strata tinggi. Keinginan ini menjadi pusat keuntungan bagi investor antar negara yang bergabung dengan perusahaan setempat. Dengan keinginan yang semakin meningkat ini, bukan tidak mungkin tata kelola bencana yang direncanakan semula dapat terganggu.

Literatur selanjutnya berjudul *“The UN SFDRR for Disaster Risk Reduction 2015-2030: Negotiation Process and Prospects for Science and Practice”* yang ditulis oleh Lucy Pearson dan Mark Pelling. Di dalam artikel ini menjelaskan bahwa sekitar 187 negara anggota telah menandatangani SFDRR yang menggantikan HFA periode 2005-2015. Kesepakatan yang dihasilkan di Sendai melalui perdebatan panjang selama 36 jam tanpa henti ini menjadi tahap akhir dari proses yang melibatkan konsultasi antar pemerintah dan dengan masyarakat sipil di tingkat nasional, regional, dan tingkat global. Keterkaitan antara pembangunan dan pengurangan risiko bencana menjadi penting dan tercemrin dalam penggunaan indikator ketahanan di dalam SFDRR. Perbedaan yang menonjol antara HFA dan SFDRR tercermin dengan tujuannya yang berbeda dimana di dalam HFA lebih menekankan terhadap tujuan menyeluruh dalam rangka mendukung ketahanan, SFDRR menekankan terhadap ketahanan yang hemat biaya untuk menggambarkan pasca keuntungan pembangunan bencana. Walaupun dengan kemajuan ini, terdapat beberapa kritikus yang menyebutkan bahwa SFDRR gagal memenuhi ambisinya sendiri agar “berorientasi pada tindakan” dan untuk menghadirkan pengurangan risiko bencana sebagai rasa urgensi yang diperbarui. Hal ini disebabkan karena sifat

dari SFDRR yang tidak mengikat secara hukum dan lebih menekankan terhadap rasa kesukarelaan serta dengan target yang ambigu. Kurangnya komitmen dan ambisi politik yang komprehensif dari pemerintah dalam memajukan risiko bencana sebagai bagian dari agenda global menjadi bagian dari proses dan negosiasi akhir SFDRR.

SFDRR hadir untuk menggantikan HFA yang memiliki lima bidang prioritas, yakni:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan untuk pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
3. Gunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan.
4. Kurangi faktor risiko yang mendasarinya.
5. Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif di semua tingkatan.

Prioritas 2 adalah yang paling berhasil: mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Hal yang paling sulit untuk diterapkan adalah Prioritas 4: Mengurangi faktor risiko potensial dan Prioritas 3: Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan. Perbaikan dalam pemantauan bencana dan peringatan dini telah menyelamatkan ribuan nyawa dan bersama-sama menjadi kisah sukses global, menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika sains dan kebijakan terintegrasi secara efektif. Tetapi bahkan kesuksesan ini berakhir dengan jalan buntu. Peningkatan bertahap dalam peringatan dini berbasis bahaya telah bergeser ke perubahan lambat dalam keuntungan yang diperoleh melalui penekanan yang lebih besar pada pemahaman perilaku manusia. Sama seperti sedikit kemajuan yang telah dibuat pada prioritas 3 dan 4, jauh lebih sulit untuk menyelesaikan kesenjangan pengetahuan dasar dan penyebab risiko. Tinjauan surveilans UNDRR sendiri sangat menghancurkan, menggambarkan kemajuan Prioritas 1, 2, 4, dan 5 sebagai “pencapaian komitmen institusional tetapi tidak ada pencapaian besar atau substantial”.

Literatur terakhir berjudul *“Assessment of the SFDRR for Disaster Risk Reduction Studies since 2015”* yang ditulis oleh Emmanuel Tolulope Busayo, Ahmed Mukalazi Kalumba, Gbenga Abayomi Afuye, Olapeju Yemande Ekundayo, dan Israel Ropo Orimoloye. SFDRR secara khusus diinisiasi untuk memajukan PRB secara global untuk lebih memahami kompleksitas dari risiko bencana di zaman kita sekarang. Namun, esensi dari SFDRR masih belum dianut dengan baik di seluruh negara mengingat penerapannya pembahasan kerangka kerja di tingkat lokal. Selain itu, global perubahan dan tantangan telah menyebabkan berbagai risiko yang berkembang belakangan ini, refleksi ini harus menawarkan komitmen baru untuk keberlanjutan manusia mampu hidup, ketahanan dan kesejahteraan. Studi tentang perubahan iklim adaptasi dan PRB menyoroti hubungan sebab akibat antara iklim perubahan dan risiko bencana yang telah dinilai dan ditentukan oleh: kerentanan, keterpaparan, dan kekuatan populasi untuk mempersiapkan, merespons, dan pulih dari dampaknya. Namun, sebuah paradigma pergeseran dari respons bahaya untuk mengidentifikasi risiko, menilai dan peringkat mereka telah menjadi kritis baru-baru ini. Fokus dari pergeseran ini adalah ditempatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penduduk setempat dan interpretasi risiko di samping ambang batas tindakan mereka. Ini menyiratkan bahwa membawa sinergi antara indikator sosial risiko, implementasi kebijakan yang kuat, mis. SFDRR dan lembaga kolektif bantuan yang didukung oleh keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih baik pembangunan sosial ekonomi dapat tercapai. Studi ini didasarkan pada penilaian global penelitian yang dilakukan pada studi SFDRR antara tahun 2015 dan 2019.

Studi ini menyoroti pertumbuhan literatur SFDRR selama periode survei. Perlu dicatat bahwa implementasi SFDRR pada tahun 2015 telah menunjukkan potensi di semua bidang, terutama dalam perubahan iklim dan risiko bencana. Hasil penelitian ini menekankan pengaruh negara dalam mempromosikan kegiatan penelitian dan kontribusi pengetahuan. Selama masa studi, Inggris menempati peringkat pertama dalam hal jumlah penulis yang sesuai. Selain itu, dalam dokumen kerangka Sendai yang diindeks oleh *Web of Science* (WOS) dari 2015 hingga 2019, Inggris menempati peringkat di antara negara-negara yang paling banyak dikutip,

dan sebagian besar dari negara-negara maju yang disebutkan di atas. Berbagai penerbit juga muncul dalam hasil, terutama terkait dengan bencana dan manajemen risiko.

Literatur selanjutnya adalah artikel berjudul *“Regional Policy for Disaster Risk Management in Developing Countries Within the SFDRR: A Systematic Review”* yang ditulis oleh Surianto, Syahirul Alim, Ricvan Dana Nindrea, dan Laksono Trisnantoro. SFDRR yang menjadi tujuan dari pengurangan risiko bencana dari tahun 2015-2030 menuliskan bahwa 700 ribu orang telah kehilangan nyawa, 1,4 juta orang terluka, dan sekitar 23 juta orang kehilangan rumah akibat bencana. Sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur manajemen bencana untuk mengurangi dampak tersebut. Di Asia sendiri selama beberapa dekade terakhir telah mengalami 1730 bencana alam. Di dalam artikel tersebut, peneliti menemukan bahwa hanya ada beberapa penelitian berbasis teori dan kebijakan dan tindakan manajemen risiko bencana harus berdasarkan pemahaman risiko bencana meliputi kerentanan, kapasitas, masyarakat dan aset yang terekspos, ancaman, dan karakteristik lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat diutilisasi menjadi asesmen risiko pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. SFDRR sendiri terbagi menjadi empat prioritas sehingga peneliti membagi analisisnya ke dalam empat prioritas tersebut.

Setelah membaca dan meninjau beberapa literature review yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa Filipina sebagai negara yang rentan bencana masih belum optimal dalam mengaktualisasikan prioritas yang telah disetujui bersama di dalam SFDRR sehingga perlu dianalisis kembali apa saja kendala yang terjadi dan bagaimana Filipina dapat mengatasi masalah tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Filipina menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang rentan terhadap bencana alam karena wilayah negaranya yang berada tepat di atas garis khatulistiwa dan suhu air laut di atas normal. Suhu air laut normalnya berada di atas 28° – 32° Celsius tetapi suhu air di Filipina dapat mencapai lebih dari suhu air laut yang normal sehingga dapat memicu angin topan. Dalam melakukan upaya

penanggulangan bencana, Filipina telah melakukan berbagai cara seperti berpartisipasi dalam organisasi AHA Centre, sebuah organisasi di bawah ASEAN yang berfokus dalam upaya penanggulangan bencana. Filipina juga telah menandatangani SFDRR periode 2015-2030.

Panduan yang hadir dalam bentuk SFDRR periode 2015-2030 diharapkan menjadi angin segar bagi pemerintah Filipina serta aktor di dalamnya yang sama-sama berperan aktif dalam respons bencana agar terjadinya manajemen bencana di Filipina yang lebih baik sehingga dengan hal itu, peneliti memperoleh rumusan masalah, ***“Bagaimana Pengaruh Sendai Framework for Disaster Risk Reduction periode 2015-2030 dalam Meningkatkan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana di Filipina pada tahun 2016-2020?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar efektivitas dari implementasi SFDRR terhadap manajemen pengurangan risiko bencana di Filipina pada tahun 2016-2020
2. Mengetahui bagaimana Filipina melakukan aksi nyata berdasarkan prioritas yang ada di dalam SFDRR yang telah menjadi *International Norms* untuk manajemen bencana.
3. Mengidentifikasi pola kerjasama atau interaksi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Filipina dalam penerapan SFDRR 2016-2020.
4. Menganalisis hambatan dari manajemen bencana di Filipina dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Filipina pada tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait manajemen bencana dalam perspektif ilmu Hubungan Internasional bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan dan studi kasus bagi para peneliti, pegiat, praktisi ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat umum yang tertarik terhadap isu bencana terkait penelitian di bidang bencana dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan skripsi yang dibahas, peneliti membagi laporan skripsi ini dalam 5 Bab dengan Sub-bab yang berkaitan satu dengan lainnya agar hasil yang diciptakan lebih komprehensif. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah yang akan peneliti teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian mengenai penelitian terdahulu yang telah peneliti kaji berasal dari hasil pemikiran beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan), kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dasar.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yang didalamnya memuat pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV: BENCANA SEBAGAI MASALAH KEAMANAN INSANI DI FILIPINA

Bagian ini membahas mengenai sejarah dari manajemen bencana hingga hadirnya manajemen bencana di Filipina sekarang ini. Peneliti juga akan membahas bagaimana bencana dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia karena hadirnya bencana dapat menimbulkan masalah di berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dll. Selain itu, peneliti juga akan membahas risiko bencana di Filipina serta kerentanan yang ada di Filipina hingga saat ini serta menjelaskan beberapa kasus bencana yang disebabkan oleh alam yang telah terjadi di Filipina di tahun 2016-2020

BAB V: IMPLEMENTASI SFDRR DALAM RESPONS BENCANA DI FILIPINA TAHUN 2016-2020

Bagian ini membahas mengenai perkembangan yang terjadi setelah penandatanganan SFDRR 2015-2030 dalam manajemen bencana alam di Filipina mulai dari perbaikan sistem dalam melakukan persiapan, respons, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi bencana di Filipina, regulasi yang disusun setelah itu, serta peran dan fungsi dari aktor baik dari pemerintah maupun NGOs dalam menangani bencana alam di Filipina. Peneliti ingin membahas terkait hal tersebut dengan mengurutkan kasus bencana alam yang telah terjadi di Filipina di tahun 2016-2020 dan bagaimana *SFDRR* dilaksanakan selama Filipina melakukan manajemen bencana sehingga dapat menjadi perbandingan dari sebelum penandatanganan dan sesudahnya serta dapat memberikan solusi dalam penanganan bencana alam di Filipina. Di bagian ini peneliti juga akan menjabarkan apa saja hambatan dan penanganan yang telah dilakukan oleh Filipina selama melakukan tanggap darurat

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang disajikan oleh peneliti berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA